

BAB. I

ENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu faktor untuk peningkatan pemebangunna dalam suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. Pendidikan telah menjadi kebutuhan setiap masyarakat dalam setiap periode sejarah dan pendidikan yang telah dianggap sebagai kebutuhan social dalam setiap masyarakat karena pendidikan merupakan suatu proses dari sperpektif masyarakat. fakta bahwa pendidikan dianggap sebagai kebutuhan oleh setiap masyarakat disegala usia (Gelisli & Beisenbayeva, 2015). (1)

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan suatu sarana layanan pendidikan untuk semua masyarakat yang masih membutuhkan sekolah tanpa terkecuali di tingkat pendidikan dasar sederajat. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa deskriminasi. Salah satu peran Negara dalam hal ini adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia dan juga memebahas mengenai sisitem pendidikan nasional mengertikan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan dari komponen komponen penduididkan yang kompleks dan saling berkaitan dlam menacapai dari sebuah tujuan pendidkan nasional.

Maka dari itu agar dapat mengacu system pendidikan nasional penyelenggaraan pendidikan harus mendapatkan dukungan dan kebijakan dari

seluruh komponen yang bersangkutan dimulai dari pemerintahan itu sendiri, dan di dorong oleh wali murid dan siswa-siswi agar tujuan mewujudkan pendidikan yang adil dalam melakukan tindakan nyata dan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak usia sekolah di Indonesia.

Tetapi hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan belum berjalan secara optimal dengan beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia seperti rendahnya kualitas pendidikan, mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah pendidikan tinggi swasta. Di sekolah yang berstatus negeri pun masih banyak membebankan biaya pendidikan yang itu dapat dirasakan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah atau masyarakat yang kurang mampu masih mahal. Ditingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP negeri pemerintah telah memberikan subsidi pendidikan namun bantuan ini masih kurang dan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dimana biaya yang ditanggung orang tua wali berupa biaya operasional pokok yang masih tinggi (Kusno & Suib 2009) (2). Beberapa faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan di Indonesia mahal, antara lain: 1) Pemberian gaji guru yang di rubah secara relative (teachers salaries), 2) adanya kenaikan harga (rising price), 3) perubahan populasi dibarengi kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri, 4) terjadi peningkatan standar pendidikan (educational standards), 5) tuntutan pada pendidikan lebih tinggi (higher education), 6) peningkatan anak putus sekolah (Ferdi, 2013) (3). Selain itu faktor yang menjadi penyebab utama masih rendahnya pendidikan Indonesia, juga karena banyaknya anak-anak yang tidak bersekolah dan berhenti atau tidak melanjutkan sekolahnya. Alasan anak-anak tidak bersekolah

bahkan berhenti sekolah disebabkan oleh keadaan ekonomi yang rendah hal ini tentunya sudah tidak asing lagi, keadaan ekonomi keluarga yang rendah menjadi hambatan bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya. hal ini tentunya sangat disayangkan, karena itu dapat membuat pendidikan di Indonesia menjadi rendah.

Disinilah pemerintah selanjutnya mengambil perannya dengan meluncurkan sebuah kebijakan di bidang pendidikan berupa pemberian BOS. Program BOS ditujukan pada semua peserta didik baik dari kalangan ekonomis atau menengah kebawah. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah diluncurkan pada tahun 2005 (Depdiknas:2009) (4). Untuk implementasi pada tahun 2020, memiliki petunjuk teknis BOS adalah untuk meringankan Biaya Operasional Sekolah yang harus dibayarkan serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dalam pembelajaran untuk peserta didik yang diterapkan sesuai prinsip fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi (Kemendikbud,2020).(5)

Dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan biaya operasi nonpersonalia bagi suatu pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan dari dana BOS yaitu dapat membantu pihak sekolah maupun orang tua murid agar dapat memperoleh keringanan biaya sekolah murid, selain itu serta mendapatkan fasilitas sekolah yang baik, layak dan memadai seperti buku yang dapat disediakan perpustakaan sekolah, seragam sekolah serta peralatan penunjang kegiatan sekolah lainnya. dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan sesuai kebutuhan sekolah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku (Ulumudin & Martono,2018) (6).

Dengan penyaluran dana bantuan operasional sekolah yang mekanismenya telah diatur oleh pemerintah pusat yang menjadi pedoman utama pelaksanaan program BOS.sekolah yang yang enerima dana BOS tersebut seharusnya memberikan kemanfaatannya bagi penerima.sekolah penerima selanjutnya bertanggung jawab mengelolanya adalah Kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah.Dalam pengelolaannya kepala sekolah berkoordinasi dengan tim pengelolaan dana BOS untk berbagai kebutuhan yang diperolehkan menggunakan dana BOS.

Program Bantuan Operasional Sekolah sudah mulai dilaksanakan sejak bulan juli 2005.Program BOS berperan sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan wajib belajar selama 9 tahun.Meurut PP Nomor 48 Tahun 2008 mengatur mengenai pendanaan pendidikan,dimana menjelaskan bahwa biaay non personalia adalah biaya untuk belanja barang langsung habis pakai dan biao tak langsung seperti uang lembur guru,uang transportasi ,konsumsi dan lain-lain.Namun masih terdapat jenis pembiayaan lainnya yang diperbolehkan menggunakan anggan BOS ,ini diatur dalam petunjuk teknis penggunaan anggran (Sukmawati & Rahaju,2016) (7).

Alokasi anggaran setiap tahunnya mengalami penyesuaian pada ketersediaan jumlah APBN (Anggaran pendapatan dan belanja Negara) untuk bidang pendidikan sendiri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun . Pada tahun ketahun jumlah ini tidak bisa dipastikan naik atau turun namun Negara tetap harus memberikan prioritas anggaran dana dibidang pendidikan yaitu sekurang kurangnya 20% dari seluruh dana APBN dan APBD kota setempat (Sulfiati & Irwan,2010) (8).Dengan memberikan Alokasi dana yang besar untuk pendidikan

ini akan memberikan dampak signifikan pada peningkatan prestasi dan pencapaian siswa (Abott et al.2020) (9).

Bantuan operasional sekolah yang pertama dilaksanakan yaitu tepat pada bulan juli 2005,pada awal mulanya di sebabkan oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan akibat kenaikan harga BBM dan nilai tukar Rupiah dapat dipahami,karena sebagian besar pengeluaran adalah kebutuhan pokok.Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu,yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program bantuan operasional sekolah atau dikenal dengan BOS.

Jika dilihat dari keseluruhan kondisi pendidikan di Indonesia,jumlah siswa putus sekolah ditingkat sekolah dasar setiap tahunnya rata-rata 600.000-700.000 siswa,serta siswa SLTP putus sekolah sebelum selesai masa belajarnya setiap tahun rata-rata sebanyak 150.000-200.000 siswa (Astri,2011) (10). Data tersebut merupakan data nasional sedangkan di kota padang sendiri jumlah putus sekolah di jenjang SD kurang lebih sebanyak 349 siswa.Dari data tersebut dapat dilihat pendidikan di Indonesia masih berada pada kondisi tidak baik-baik saja yang di akibatkan oleh biaya pendidikan yang masih tinggi.maka dari itu peneliti ingin mengevaluasi kembali bagaimana pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah dasar (SD) terkhusus SD Negeri 14 Koto panjang pauh.

Evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan Pendidikan dapat dicapai (farida,2000:3) (11).Dengan demikian akan dapat diketahui apakah program tersebut layak dilanjutkan,dibenahi atau harus dihentikan .sesuai dengan uraian diatas ,maka mengukur keberhasilan program BOS dibutuhkan sekali tolak ukur sebagai alat untuk melihat sampai sejauh mana efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bos dalam mencapai tujuan yang telah

direncanakan. Hal ini ditunjukan untuk memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menyalurkan dana BOSNAS dan pengawasan dalam penyaluran dana dari daerah ke rekening sekolah. beberapa permasalahan dari mekanisme ini telah di evaluasi dan menghasilkan kebijakan baru mengenali penyaluran dana BOS (Anggraini,2013) (12).

Suatu kebijakan dan ketentuan yang telah di implementasikan terdapat masalah baru yang membuat jalannya pendidikan di Indonesia terhambat, salah satunya yaitu penyelewengan dana BOS dan ketidak efektifan pengelolaan BOS. permasalahan lainnya terjadi pada tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai kurang yang di sebabkan faktor kebebasan akses untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan BOS. Sehingga dalam implementasinya kurang adanya transparansi dan akuntabilitas. Tetapi seharusnya dibutuhkan orientasi yang baik dalam penggunaan dana BOS ini dengan mengacu pada 4 hal yaitu Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas (Anggraini,2013) (12).

Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri tersebut, secara efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. masyarakat sebagai wali murid merupakan anggota dari kelompok yang terkena dampak dari dana BOS yang ada di sekolah tersebut, wali murid berhak mendapatkan informasi terkait BOS pada sekolah tersebut. Selain itu, dari Transparansi sebagai unsur menciptakan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu pengelolaan dana BOS yang ada di SDN tersebut sudah dikatakan transparansi karena anggaran yang telah direncanakan sudah ditempel di dinding sekolah dengan tujuan agar masyarakat atau orang tua siswa dapat mengetahui dana BOS yang ada di SDN tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bendahara BOS bawasannya Manajemen pengelolaan program BOS di sdn 14 koto panjang ,pauh ini yang di kelola langsung oleh bendahara BOS ,dengan pengawasan kepala sekolah itu sendiri dan team BOS nya dan cara pengelolaannya menggunakan aplikasi RKAS (Rencana kegiatan dan anggaran sekolah) dalam pengelolaan tersebut harus sesuai dengan RKAS yang di entrikan di aplikasi dan BOS yang ada di sdn 14 koto panjang pauh.

Dalam pelaksanaannya ini yang menjadi faktor pendukung adalah kerja sama antara staf guru yang mau ikut serta membantu untuk melakukan proses dari perencanaan pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dalam proses pelaporan meliputi persiapan data keuangan ,selain itu keadaan sekolah yang cukup layak sehingga penggunaan dan BOS tidak terlalu difokuskan kepada perbaikan sekolah saja. penyusunan RKAS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terperinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan asas periodic dan asas pembebanan. Dalam hal ini prosedur dan mekanisme yang digunakan harus efektif dan efisien. Dan jika berkurangnya aparatur yang memahami tentang administrasi keuangan merupakan factor penghambat dalam pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS).

Maka dari itu dana BOS perlu dilakukan evaluasi agar dapat mengetahui keefektifitas pelaksanaannya serta dapat memberikan masukan-masukan dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian juga dapat dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS tersebut, dan juga dapat mengetahui hambatan dan kendala dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 14 Koto panjang, pauh.

Berdasarkan hal tersebut ,penelitian tertarik meneliti tentang “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 14 Koto Panjang Pauh”.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) setiap sekolah harus sesuai dengan aturan dari dana BOS dan sesuai dengan teknis Bantuan Operasional Sekolah(BOS).Dalam petunjuk teknis BOS sudah dijelaskan di perinci bagian atau berapa banyak dana yang harus dikeluarkan melalui penelitian ini akan diketahui:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SDN 14 koto panjang pauh?
2. Bagaimana cara penerapan transparansi pada laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 14 koto panjang pauh?
3. Bagaimana tingkat ke efektivitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SDN 14 Koto panjang pauh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara sistem pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di SDN 14 Koto Panjang Pauh?
2. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana penerapan transparansi pada laporan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat ke efektifan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a.) berharap Penelitian ini bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai setiap unsur dari kebijakan atau program serta gabungan unsur dan program yang paling efektif yaitu berdasarkan biaya yang diberikan sehingga efisiensi dalam melaksanakan kebijakan atau program mampu tercapai
- b.) berharap penelitian ini bisa memberikankan data-data yang diperlukan untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu kebijakan atau program harus dilanjutkan atau tidak.
- c.) Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Peneliti

Sebagai peneliti, sebagai tambahan ilmu dan pengalaman penelitian tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagaimana cara penerapan akuntabilitas pada laporan keuangan Dana BOS yang ada di SDN 14 Koto Panjang Pauh serta sebagai penerapan ilmu selama di bangku kuliah.

b.) Bagi Pemerintahan

Dapat Meningkatkan kualitas Pengawasan dan bahan pertimbangan suatu masukan yang positif untuk suatu kebijakan yang akan dibuat selanjutnya untuk meningkatkan pendidikan bermutu kedepannya. serta dapat meningkatkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan BOS di dalam menentukan suatu kebijakan.

c.) Bagi pihak Sekolah Penerima Dana BOS

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kestabilan akuntabilitas,terkhusus untuk kepala sekolah dalam laporan keuangan Dana BOS.sehingga laporan dana BOS dapat tersusun dengan baik dan tercapai tujuannya dan juga lebih transparan dalam pengelolaan Dana bos tersebut.

d.) Bagi Orang Tua Dan Masyarakat

Dapat memberikan sepengetahuan dan informasi mengenai Dana BOS yang di peroleh pihak sekolah, dan dapat mencari pengetahuan mengenai apakah laporan keuangan Dana BOS sudah seusai dengan tujuan.